



Fungsi Pemerintah Kelurahan Waso dan Kelurahan Bangka Leda dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi

The Function of The Waso Village and Bangka Leda Village Governments in Supporting Economic Growth During The Pandemic

¹⁾ Albertus Tapuk Parus, ²⁾ Saryono Yohanes, ³⁾ Hernimus Ratu Udju

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia.

*Email: ¹⁾ albertusparus@gmail.com, ²⁾ saryono.yohanes@staf.undana.ac.id, ³⁾ hernimus@staf.undana.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ Albertus Tapuk Parus

DOI:

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: Fungsi Pemerintahan Kelurahan Waso Dan Bangka Leda Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dimasa Pandemi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah fungsi pemerintahan kelurahan dalam pembangunan daerah /kota pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai?, 2) Apa saja upaya dari pemerintah kelurahan Waso dan Kelurahan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan di era pandemi COVID-19?. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan 1) Fungsi pemerintahan kelurahan dalam pembangunan daerah /kota pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, 2) Upaya dari pemerintah kelurahan Waso dan Kelurahan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan di era pandemi COVID-19. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio legal. Teknik pengumpulan data : wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dan Pembahasan : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan dalam Pembangunan Daerah pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dari pemberdayaan masyarakat sedangkan pembangunan fisik selama masa pandemik untuk sementara dihentikan. Upaya dari Pemerintah Kelurahan Waso dan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan Daerah di era Pandemi Virus Covid-19. Pada umumnya berfokus pada peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar khususnya dalam bidang kesehatan dan juga pengembangan ekonomi produktif.

Kata Kunci: Kelurahan, Covid-19, Bantuan Sosial, Keadilan

ABSTRACT

This research is entitled: The Functions of the Administration of Waso and Bangka Leda Villages in Supporting Economic Growth During the Pandemic. The formulation of the problem in this research is 1) What is the function of sub-district administration in regional/city development in the Covid-19 era in Waso and Bangka Leda Sub-districts, Langke Rembong District, Manggarai Regency?, 2) What are the efforts of the Waso and Bangka Leda Sub-district governments in implementing development in the era of the COVID-19 pandemic?. The purpose of the study was to explain 1) The function of the sub-district government in regional/city development during the Covid-19 era in Waso and Bangka Leda Subdistricts, Langke Rembong District, Manggarai Regency, 2) The efforts of the Waso and Bangka Leda Sub-District Governments in carrying out development in

the era of the COVID pandemic-19. The type of research used is empirical juridical research. The data sources used are primary and secondary data sources. The approach used is a socio legal approach. Data collection techniques: interviews, observation, and literature study. The data analysis technique used is qualitative. Results and Discussion: The implementation of the Duties and Functions of the Kelurahan Government in Regional Development during the Covid-19 era in the Waso and Bangka Leda Sub-districts focused more on meeting basic needs from community empowerment while physical development during the pandemic was temporarily stopped. Efforts from the Waso and Bangka Leda Village Governments in carrying out regional development during the Covid-19 Pandemic Virus era. In general, it focuses on improving quality and access to basic services, especially in the health sector, as well as developing a productive economy.

Keywords: *Ward, Covid-19, Social Assistance, Justice*

PENDAHULUAN

Kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk di Indonesia, telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi (Rosita, 2020). Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah kelurahan menjadi sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi (Novitasari, 2022). Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan yang signifikan aktivitas ekonomi di banyak daerah, termasuk ditingkat kelurahan. Banyak usaha kecil dan mikro mengalami kesulitan dalam menjalankan operasional mereka dan menghadapi tantangan, seperti menurunnya permintaan, kendala akses permodalan menurunnya daya beli masyarakat, dan perubahan perilaku konsumen (Pratiwi, 2020) (Anatan & Ellitan, 2023).

Dalam konteks ini, pemerintahan kelurahan perlu memainkan peran-peran yang produktif dalam mengatasi masalah ekonomi yang timbul dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu fungsi utama pemerintah kelurahan adalah menyediakan layanan dan fasilitas dasar kepada masyarakat, termasuk infrastruktur pendukung ekonomi (Luthfia & Alkhajar, 2019) (Asariansyah, 2013). Dalam situasi pandemi, pemerintah kelurahan harus dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengalokasikan sumber daya yang tepat guna untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur pendukung ekonomi, seperti jalan, drainase, dan jaringan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik dan memudahkan aksesibilitas, distribusi dan konektivitas bagi para pelaku usaha ditingkat kelurahan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Selain itu pemerintahan kelurahan juga dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada pelaku usaha kecil dan mikro dalam menghadapi tantangan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi. Misalnya, melalui program bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan bisnis, atau fasilitas pengembangan usaha. Pemerintah kelurahan juga dapat memfasilitasi kerja sama antara pelaku usaha lokal untuk meningkatkan skala produksi, memperluas pasar, atau memperkenalkan inovasi dalam produk atau layanan mereka. Selain itu pemerintah kelurahan juga berperan dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa ditingkat lokal (Moenardy et al., 2023) (Tanjung et al., 2023).

Dalam situasi pandemi dimana pasokan dan permintaan dapat berfluktuasi secara tiba-tiba pemerintah kelurahan dapat melakukan koordinasi dengan para pedagang, produsen, dan distributor untuk menghindari praktik monopoli, penimbunan barang, atau penjualan dengan harga yang tidak wajar, langka-langka seperti ini akan menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi lokal, dan mencegah terjadinya inflasi yang merugikan masyarakat. Dalam konteks pandemi COVID-19, pemerintah kelurahan juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi program-program sosial ekonomi yang dapat membantu masyarakat terdampak dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Misalnya, pemerintah kelurahan dapat mengkoordinasikan pendistribusian bantuan sosial, memfasilitasi program bantuan pangan, atau mengadakan program pelatihan keterampilan dan pengembangan kerja agar masyarakat dapat memiliki sumber penghasilan yang alternatif. Selain itu, pemerintah kelurahan juga dapat berperan dalam mempromosikan dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Melalui upaya berunding dan pemasaran, pemerintah kelurahan dapat meningkatkan citra dan daya tarik wilayah mereka sebagai tujuan investasi dan wisata. Pemerintah kelurahan dapat mengadakan promosi produk lokal, mengembangkan kemitraan dengan pelaku industri kreatif, atau mendukung kegiatan pariwisata yang aman dan terkendali. Pemerintah kelurahan juga memiliki peran penting dalam menggalang kolaborasi antara pelaku usaha, masyarakat, dan sektor terkait lainnya (Lepa et al., 2019) (Ringa, 2020). Dengan memfasilitasi dialog dan forum diskusi, pemerintah kelurahan dapat menciptakan kerja sama yang baik antara berbagai pihak untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi. Misalnya dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat lainnya, pemerintah kelurahan dapat menciptakan program-program kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Dalam konteks pandemi COVID-19, adaptasi digital juga menjadi kunci penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah kelurahan dapat memfasilitasi pelaku usaha lokal untuk bertransformasi ke ranah digital melalui pelatihan e-commerce, pembuatan situs web, atau penggunaan platform online untuk memasarkan produk dan layanan mereka. Dengan memperluas akses pasar melalui platform digital, pelaku usaha lokal dapat meningkatkan daya saing dan memperoleh peluang baru dalam menghadapi situasi pandemic. Melalui peran aktif pemerintah kelurahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dimasa pandemi COVID-19, diharapkan dapat tercipta keberlanjutan ekonomi lokal dan pemulihan yang lebih cepat (Usaha, 2021). Dengan memperkuat infrastruktur, memberikan dukungan kepada pelaku usaha, menjaga stabilitas harga, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan mendorong kolaborasi, pemerintah kelurahan dapat menjadi katalisator dalam membangkitkan sektor ekonomi ditingkat kelurahan serta mendorong kemandirian masyarakat dalam menghadapi tantangan global.

Selain dari sudut pandang ekonomi, peran pemerintah kelurahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dimasa pandemi COVID-19 juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum tata negara. Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, pemerintahan kelurahan merupakan bagian dari struktur administrasi pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas yang diatur secara jelas oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembentukan dan fungsi pemerintah kelurahan. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah kelurahan diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ditingkat kelurahan. Salah satu aspek yang diatur adalah pelayanan dan fasilitas yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat.

Pandemi COVID-19 menjadikan pemerintah kelurahan memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langka yang diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan prinsip desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut prinsip bahwa kekuasaan pemerintah dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kelurahan. Pemerintah kelurahan juga dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik terkait dengan tugas dan wewenang mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dimasa pandemi. Misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur tugas dan fungsi pemerintah kelurahan dalam penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Selain itu, peran pemerintahan kelurahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan prinsip keadilan sosial yang diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah kelurahan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan publik dan fasilitas ekonomi tersedia secara merata kepada seluruh masyarakat, termasuk dalam situasi pandemi. Prinsip keadilan sosial ini mengaris bawahi pentingnya pemerintah kelurahan dalam memperhatikan kepentingan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi secara adil dan berkeadilan.

Hukum tata negara pemerintah kelurahan juga memiliki hubungan dengan pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan utama dalam penyelenggaraan pemerintah ditingkat lokal. Kerja sama dan koordinasi antara pemerintah kelurahan dan pemerintah daerah perlu ditekankan guna memastikan keberhasilan program-program ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah kelurahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif hukum tata negara pemerintah kelurahan juga bertanggung jawab dalam menjaga kesetabilan sosial menjadi faktor krusial dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah kelurahan memiliki peran penting menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung implementasi protokol kesehatan dan pembatasan sosial yang diperlukan untuk mengendalikan penyebaran sosial (Widdefrita et al., 2023) (Tjakradiningrat et al., 2021). Selain itu, pemerintahan kelurahan juga berkaitan dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Prinsip otonomi daerah memberikan keluasaan kepada pemerintah kelurahan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal (Ismail, 2020) (Ariyanto, 2020). Dalam hal ini, pemerintah kelurahan dapat mengembangkan program-program inovatif, menggali potensi lokal, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada ditingkat kelurahan untuk memperkuat sektor ekonomi.

Pandemi COVID-19 telah mengubah dinamika sosial dan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di tingkat kelurahan. Adanya dampak signifikan pada sektor ekonomi lokal mengundang perhatian untuk memahami peran dan fungsi pemerintah kelurahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam terkait upaya pemerintah kelurahan dalam mengatasi dampak ekonomi pandemi COVID-19 dan mempercepat pemulihan. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan pemerintah kelurahan dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa pandemi serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan dengan mengoptimalkan sumber daya ekonomi yang ada.

METODE

Lokasi Penelitian di dua Kelurahan, yaitu Kelurahan Waso dan Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara langsung lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jenis dan Sumber Data yaitu Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dalam hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat dan turun langsung di lapangan baik itu melalui wawancara dan kuisioner. Diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan melainkan. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menempatkan penelitian sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data penelitian ini, yaitu: Wawancara, Observasi dan Studi Kepustakaan /Dokumentasi. Dalam mengolah dan menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata- kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, dan potret yang dilakukan penulis secara langsung di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintahan Kelurahan Waso dan Bangka Leda Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Kelurahan Waso dan Kelurahan Bangka Leda merupakan daerah di wilayah Kabupaten yang memprioritaskan kegiatan pembangunan pada hal sebagai berikut:

1. Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan daerah atau produk unggulan kawasan kota.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan.
3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. Selama masa pandemik Covid-19 pemerintahan Kelurahan mendorong perangkat kelurahan untuk mengambil fungsi dan peranan khusus dalam penanggulangan wabah Covid-19.

Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintahan kelurahan adalah Pertama, perangkat Kelurahan harus mengolah arus data dan informasi seluruh warganya yang mencakup kondisi ekonomi ekonomi warga untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama pandemik. Kedua perangkat kelurahan harus mampu mengelola kendali informasi terkait Covid-19. Ketiga perangkat kelurahan mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Keempat perangkat kelurahan dapat membuat perantara sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di Kelurahan. Terakhir pemerintah Kelurahan harus memberikan informasi terkait Covid -19 setiap hari. Fungsi dan peran tersebut juga dapat membantu pembangunan Kelurahan terutama dari aspek pemenuhan kebutuhan dasar serta perekonomian warga.

Hal ini Selaras dengan yang disampaikan oleh Lurah Kelurahan Waso bapak Kalisius Radom:

Pelaksanaan tugas dan fungsi kami sebagai pemerintahan kelurahan selama Covid-19 ini berjalan secara sistematis karena wabah ini bukan lagi berskala nasional tetapi berskala internasional sehingga otomatis dia punya penanganan itu sistematis dari pusat ke bawah sehingga yang kami laksanakan di kelurahan ini sesuai dengan instruksi dan protocol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat Provinsi dan Daerah. Pemenuhan kebutuhan dasar kami sebagai Pemerintahan Kelurahan Lebih berfokus pada kesehatan warga supaya tidak terkena wabah Covid-19 dari aspek sarana dan prasarana Kabupaten/kota saya kira nanti kaur pembangunan yang dijelaskan, dan kalau untuk aspek pembangunan ekonomi kami melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai T.A 2021 Kecamatan Langke Rembong anggaran 3.554.583.000 juta dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi kami. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawa 1000 ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Program pengelolaan dan pengembangan Sistem air dan limbah. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi lokal kami bangun lapak untuk menjual ikan lalu kami ambil distribusinya dari sana untuk kaskelurahan itu sebenarnya tindakan yang kami ambil untuk meminimalisir dampak covid terutama dalam bidang ekonomi (Wawancara DK, Pemerintahan Kabupaten Kelurahan Waso).

Lebih lanjut, Kaur pembangunan kabupaten/kota Kelurahan Waso bapak Hermansius Asal menjelaskan: Di Awal penyebaran Covid 19 di Kelurahan Waso sudah melaksanakan posko-posko yang di tiga titik pintu masuk Rowang, Wae Palo, dan Leda. Di situ kita bangun posko yang dilakukan disana yang bersifat mendasar seperti menyediakan sanitiser atau alat cuci tangan kemudian pengukur suhu tubuh. Kalau untuk pembangunan fisik seperti jalan itu ada dua titik yang tidak dilanjutkan karena dana daerah dialihkan ke penanganan Covid (Wawancara Ap, Pemerintah Kelurahan Waso).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemerintah Kelurahan Waso yaitu dari Sekretaris Kelurahan dan Lurah. Masing-masing responden menjelaskan bahwa pembangunan kabupaten atau kota pada kelurahan Waso pada masa Pandemic Covid-19 sudah berjalan baik. Lebih lanjut Sekretaris Lurah dan Kaur Perencanaan menjelaskan bahwa selama masa Pandemic perangkat Kelurahan menjelaskan tugas dan fungsi khusus dalam penanggulangan Covid-19 yaitu dari pemenuhan kebutuhan dasar khususnya segi ekonomi perangkat kelurahan mengelola data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga agar dapat menjamin kualitas hidup dan kesehatan mereka selama masa pandemic Covid-19.

Ditinjau dari aspek pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan kelurahan lebih memprioritaskan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penanggulangan wabah seperti memperadakan tempat cuci tangan di beberapa titik dan memperbedakan posko-posko di setiap perbatasan keluar masuk daerah serta menyiapkan tempat karantina walaupun ada beberapa pembangunan fisik yang tidak dilanjutkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Waso yaitu bapak Marsi Ampur menyatakan:

Selama masa pandemik pembangunan terutama dari segi pemenuhan kebutuhan dasar dan ekonomi sudah sangat dirasakan oleh warga terutama dengan adanya bantuan BLT dari dana daerah. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa akibat Covid-19 Pemerintah Kelurahan juga sudah menjalankan BUM

Daerah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di Kelurahan Waso selama masa pandemik tidak jauh berbeda dengan Kelurahan Bangka Leda. Fokus kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kelurahan yang meliputi: kegiatan yang mempermudah masyarakat kelurahan memperoleh pelayanan kesehatan serta informasi khususnya terkait Covid- 19. Selain itu pemerintah juga menggerakkan partisipasi masyarakat terutama dalam pengembangan usaha ekonomi yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja bagi warga kelurahan dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat daerah utamanya keluarga-keluarga miskin.

Hasil wawancara dengan Lurah Bangka Leda yaitu bapak Siprianus Jemparut menyatakan: “Tugas dan kewajiban dari pemerintahan kelurahan Bangka Leda untuk melayani masyarakat dalam situasi pandemi covid-19 sangat diprioritaskan dan sangat krusial dalam kebutuhannya seperti kesehatan. Dalam menangani kasus kesehatannya, kami menggunakan dana dari pusat dalam penanganan Covid di kelurahan. Kedua pemberdayaan masyarakat, hal ini kami lakukan dengan melakukan pemberian BLT (bantuan langsung tunai) pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Jadi per KPM uangnya Rp.300.000 per bulan. Tahun 2020-2021 itu KPM-nya Kelurahan Bangka Leda ini sebanyak 197 orang kalau dijumlahkan Rp 300.000 kali 12 bulan anggarannya itu mencapai Rp 700-800 juta per tahun. Sedangkan untuk Covid-nya sesuai regulasi yang ada jadi kami jalani 2020 ini jadi presentasinya hampir 30% dan yang terakhirnya sekarang ini adalah 8% untuk belanjanya itu desinfektan penyemprotan dan lain sebagainya.

Kalau untuk posko-posko yang kami jalani tahun 2020 itu poskonya diperempatan Rowang dan dipertigaan Leda dan itu untuk posko sekarang ada perubahan-perubahannya sekarang itu memang masih menjalani posko sekretariat lurah untuk sekarang ada papan tulis di luarnya itu karena poskonya itu tidak seperti yang tahun-tahun yang lalu itu ada tanggung jawab kelurahan artinya merata ,sekarang ini sesuai dengan dana yang ditentukan 8% sehingga kami istilahnya berbuat sinkron untuk melayani masyarakat andaikataada yang istilahnya terpapar virus tetapi soal obat-obatan vitamin kami sudah siapkan Itulah yang kami jalani dari 2020-2021 istilahnya sama di punya kegiatannya di tahun 2022 ini tapi sedikit berbeda karena sesuai dengan instruksi dari pusat, karena kami yang jalani Ini sesuai dengan instruksi artinya instruksi dari pusat itu yang kami jalani di kelurahan ini. Jadi selama 80% sudah jalan kegiatannya ini seperti masker habis itu obat-obatan, semprot desinfektan di sekolah di Gereja kemudian di rumah-rumah yang istilahnya mau buat acara ada hajatan itu. Jadi saya sebagai lurah telah membagi tugas semua sama seperti yang nana lihat jadwal kegiatan-kegiatannya yang ada di bingkai situ jadi sampai 1 tahun inik, ami memulai kegiatan pada bulan Mei akhir dan sekarang kami jalani tiap-tiap sekolah dan gereja yang kami jalani itu penyemprotan dan ada laporan untuk pemerintah Kelurahan. Jadi tugas-tugas kami ini memang yang selama ini yang sepenuhnya dalam penanganan Covid-19 ini sehingga semua kegiatan-kegiatan program dalam pembangunan artinya untuk sementara dihentikan. Pembangunan Kelurahan Selama Masa Pandemi di Kelurahan Wasodan Bangka Leda

Tabel 1.
Pembangunan Kelurahan Selama Masa Pandemi Di Kelurahan Wasodan Bangka Leda

Aspek Pembangunan Desa	Kelurahan Waso	Kelurahan Bangka Leda
Aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat	Berfokus pada kesehatan warga agar tidak terpapar Virus Covid-19 emberian Bantuan Langsung Tunai	Memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai
Aspek	Tahun 2020	Tahun 2020
Pembangunan sarana dan prasarana	2021 tidak ada pembangunan sarana dan prasarana	2021 tidak ada pembangunan sarana dan prasarana
Aspek pengembangan potensi ekonomi	Kegiatan Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawa 1000ha dalam 1 daerah kabupaten/kota. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic dalam daerah Kabupaten atau Kota. Menyediakan Lapak ikan bagi warga kelurahan	Tahun 2020 - 2021 belum ada
Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan	Pemanfaatan Sumber mata air bersih yaitu "wae Teku Waso" untuk pemenuhan kebutuhan Masyarakat sehari-hari	Tahun 2020 - 2021 tidak ada

Sumber data: wawancara langsung kelurahan waso dan Bangka Leda.

Secara umum, pada awal masa pandemic Covid-19 terdapat perubahan pada RPJM, berdasarkan hasil wawancara dari Kelurahan Waso dan Bangka Leda pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan kelurahan selama masa pandemic khususnya dalam bidang pembangunan daerah lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat sedangkan pembangunan fisik selama masa pandemic untuk sementara dihentikan. Berdasarkan peraturan dalam negeri RPJM terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah daerah Provinsi dan atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Wabah Covid-19 termasuk bencana non alam yang disebutkan dalam peraturan pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019.

Upaya dari Pemerintahan Kelurahan Waso dan Bangka Leda Dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah di Era Pandemic Covid-19.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan meliputi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan kelurahan. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha ekonomi produktif sertapembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan sarana dan prasarana ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup

Tabel 2.

Upaya Pemerintah Kelurahan Waso dan Bangka Leda Dalam Melaksanakan Pembangunan Desa Pada Masa Pandemi.

Kelurahan Waso	Kelurahan Bangka Leda
Memperadakan posko-posko di daerah masyarakat agar lebih mudah menjangkau informasi terkait Covid-19 - Membentuk dan mengembangkan BUM Daerah yaitu mengembangkan lapak untuk penjualan ikan dan tempat print dan Fotocopy”Anwas”serta jasa penyewaan tenda.	Melakukan sosialisasi tentang Covid-19 dan pemberian informasi terbaru terkait perkembangan Covid-19
Mengadakan pelatihan cara membuat masker dari kain bekas bagi ibu-ibu untuk dibagikan dan dijual kepada Masyarakat.	Memperagakan posko-posko di daerah masyarakat agar lebih mudah menjangkau informasi terkait Covid-19 Menyediakan Vitamin
Untuk produk unggulan yaitu kopi selama masa pandemic tidak mengalami penurunan hasil panen, akan tetapi harga jualnya lebih rendah daripada sebelum masa pendemik.	Melakukan penyemprotan disinfektan di sekolah gereja dan rumah-rumah acara
	Untuk produk unggulan yaitu kopi selama masa pandemik tidak mengalami penurunan hasil panen, akan tetapi harga jualnya sangat jauh lebih rendah daripada sebelum pandemik.

Sumber: data diolah

Umumnya upaya yang dilakukan pemerintah kelurahan Waso dan Bangka Leda dalam bidang pembangunan daerah selama masa pandemik Covid-19 berfokus pada peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar khususnya dalam bidang kesehatan dan juga pengembangan ekonomi produktif. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, upaya pemerintahan kelurahan Waso dan Bangka Leda tidak jauh berbeda khususnya dalam peningkatan dan akses terhadap informasi terkait Covid-19 upaya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi tentang Covid-19 dan pemberian informasi dan pemberian informasi terbaru terkait perkembangan Covid-19 dan pemberian informasi terbaru terkait perkembangan Covid-19.

Selain itu masing-masing daerah memperadakan posko-posko di daerah masyarakat agar lebih mudah menjangkau informasi terkait Covid-19. Selanjutnya dalam aspek pengemangan usaha ekonomi produktif. berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 daerah diberi keluasaan untuk memanfaatkan kreativitas, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kelurahan Waso

dalam aspek pengembanaan usaha ekonomi produktif adalah membentuk dan mengembangkan lapak untuk penjualan ikan. mengadakan pelatihan cara membuat masker dari kain bekas bagi ibu-ibu untuk dibagikan dan dijual kepada masyarakat dan membentuk tempat Print dan Fotocopy “Anwas”, serta jasa penyewaan tenda. Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah kelurahan Bangka Leda usaha produktif ekonomi selama masa pandemik tidak dijalankan karena karena fokus dari pemerintahan kelurahan adalah melayani masyarakat dan penanganan Covid-19. Sementara untuk produk unggulan dari Kelurahan Waso dan Bangka Leda yaitu Kopi selama masa pandemic tidak mengalami penurunan hasil panen,akan tetapi harga jualnya sangat jauh lebih rendah dari pada sebelum pandemik. Bentuk partisipasi dari masyarakat selama masa pandemic adalah dengan mematuhi protokol kesehatan dan juga menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan penyakit lain yang dapat membahayakan, sehingga pemerintahan kelurahan Waso dan Bangka Leda juga mengarahkan kepada seluruh masyarakat kelurahan untuk menjaga Kesehatan dan protocol kesehatan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, a) Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah pada era Covid-19 Di Kelurahan Waso dan Bangka Leda lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dari pemberdayaan masyarakat sedangkan pembangunan fisik selama masa pandemik untuk sementara dihentikan. b) Upaya dari Pemerintah Kelurahan Waso dan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan Daerah di era Pandemic Virus Covid-19. Pada umumnya berfokus pada peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar khususnya dalam bidang kesehatan dan juga pengembangan ekonomi produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anatan, L., & Ellitan, L. (2023). *Pengembangan Resiliensi UMKM: Perspektif Strategis*. Feniks Muda Sejahtera.
- Ariyanto, B. (2020). Pengelolaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 37–57.
- Asariansyah, M. F. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*. Brawijaya University.
- Ismail, G. (2020). Implementasi Otonomi Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 190–205.
- Lepa, O., Pangemanan, S., & Rachman, I. (2019). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pembangunan Pertanian (Studi di Kecamatan Passi Timur). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Luthfia, A. R., & Alkhajar, E. N. S. (2019). Praktik pelayanan publik: Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 71–81.
- Moenardy, D. F., Santoso, R. B., Saputera, D., Muttaqin, R., & Dewi, R. A. (2023). Diplomasi Perdagangan Indonesia Dalam Global Value Chains Produk Industri Kreatif Studi Kasus: Sentra Pengerajin Sepatu Kulit Kelurahan Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi Volume XIII No.*
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi umkm terhadap pertumbuhan ekonomi era digitalisasi melalui peran pemerintah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 184–204.
- Pratiwi, M. I. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor umkm. *Jurnal Ners*, 4(2), 30–39.
- Ringa, M. B. (2020). Place Triangle Strategy for Development of Sustainable Tourism Based on Community in Kupang City, East Nusa Tenggara. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 5(2), 9–25.
- Rosita, R. (2020). Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109–120.
- Tanjung, P. R. S., Wahyudi, S. M., & Nurlis, N. (2023). Sosialisasi Digital Marketing Strategy untuk Mencapai Kemandirian Pelaku UMKM di Lingkungan Kelurahan Meruya Utara Jakarta Barat. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 2(1), 25–35.
- Tjakradiningrat, K., Pangemanan, S. E., & Rachman, I. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Manado. *Governance*, 1(2).
- Usaha, R.-E. P. M. D. (2021). Mikro Kecil dan Menengah dalam Peningkatan Daya Saing di Era

1*) Albertus Tapuk Parus, 2) Saryono Yohanes, 3) Hernimus Ratu Udju

The Function Of The Waso Village And Bangka Leda Village Governments In Supporting Economic Growth During The Pandemic

Ekonomi Digital. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(4), 880–896.

Widdefrita, W., Silaban, E. M. L., Amos, J., & Mahaza, M. (2023). Implementasi Kelurahan Tageh Covid-19 Melalui Pendekatan Strategi Promosi Kesehatan. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 170–177.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).